



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Warga bukan Penimbun
Tanggal : Rabu, 09 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Warga bukan Penimbun

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyelidiki dugaan penimbunan minyak goreng di berbagai wilayah, seperti di Deli Serdang, Sumatra Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

FTRY WURYASTI
ftry@mediaindonesia.com

SUDAH jatuh tertimpा tangga pula. Pepatah itu sepertinya menggambarkan perasaan masyarakat saat ini. Sudah susah mendapatkan minyak goreng, malah ditutup sebagai penimbun.

Indikasi itu disampaikan Irjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko saat memantau operasi pasar minyak goreng di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang, akhir pekan lalu.

Menurut dia, lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Padahal, hasil riset menyebutkan

Ketersediaan Minyak Goreng di Beberapa Daerah

[4-7 Maret 2022]

Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menyalurkan 3.8 juta liter minyak untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan minyak goreng.

■ (Kondisi pada 8 Maret 2022)

Jakarta Selatan

Stok minyak goreng di sejumlah minimarket terpantau kosong.

Bengkulu

Stok minyak goreng tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hanya terdapat 47 ribu liter, padahal kebutuhan harian mencapai 62 ribu liter per hari.

Sulawesi Tengah

Mendapat bantuan 293 ton minyak goreng dari pemerintah pusat untuk menekan harga dan kelangkaan yang terjadi.

Dugaan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

- Belum mendapat izin untuk dikeluarkan dari distributor
- Stok dari produsen kurang.
- Ada usaha yang tidak berizin dan mencoba memanfaatkan keuntungan dan kelangkaan minyak goreng.



Sumber: Kemendag/KPPU Tim Milisbang M

syarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng.

Masalah distribusi

Kemendag membenarkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dengan harga terjangkau ada pada tingkat irigasi atau distribusi, termasuk soal penimbunan oleh sejumlah oknum.

"Bermacam manananya di irigasi. Selain itu, distribusi yang panjang," kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan dalam diskusi, kemarin.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku tengah menyelidiki dugaan penimbunan minyak goreng di berbagai wilayah, seperti di Deli Serdang, Sumatra Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sebagian besar kantor wilayah kami menemukan adanya indikasi di daerah itu. Saat ini semua informasinya tengah kami dalami," kata Kabiro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, kemarin.

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin menegaskan stok pangan dan kebutuhan pokok hingga Idul Fitri tahun ini dalam kondisi aman.

Wapres menegaskan hal itu saat mengunjungi kantor Kementerian Pertanian dan menyaksikan langsung data *real time* pangan serta infrastruktur pertanian melalui Agriculture War Room (AWR), kemarin. (Sru/Ins/Faj/Put/Che/X-10)

kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menstok minyak goreng. "Namun, ini baru terindikasi," ujarnya seperti dikutip *Antara*, Sabtu (5/3).

Yahya, 56, warga Depok, Jawa Barat, menganggap tuduhan itu terlalu berlebihan. Ia mengaku baru membeli 3 liter minyak goreng di agen sembako setelah keliling tujuh minimarket serta sebuah supermarket, kemarin. Itu pun dengan harga Rp17 ribu per liter.

"Sebenarnya enggak mau nimbul yang sampai banyak gitu. Secukupnya saja buat goreng-gorengan nanti buka puasa sama buat bikin kue. Khawatir nanti makin dekat puasa sama Lebaran

malah makin susah dapatnya," ujar karyawan swasta itu.

Anggota Komisi IV DPR Achmad Baidowi mempertanyakan sikap Kemendag yang cenderung menyalahkan masyarakat setelah gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sikap itu dinilainya tidak proporsional dan tidak profesional.

"Kami minta Kemendag tidak membuat kegaduhan baru. Fokus saja mengatasi tata niaga minyak goreng agar tidak mengalami kelangkaan dan tidak mengalami kenaikan harga," tegasnya.

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah menegaskan tuduhan Irjen Kemendag itu telah melukai hati ma-